

296
wanita - pendidikan



LAPORAN PENELITIAN

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN WANITA PADA TAHUN
1900-1990 DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBERDAYAAN WANITA
DI PANTAI UTARA JAWA TENGAH

OLEH:

DRA. CHUSNUL HAYATI, MS
DRA. DEWI YULIATI, MA
DRA. DELI NIRMALA, DIP. APPL. LING
DRS. MUALIMIN, DIP. TESL

FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
1997

=====

Dibiayai oleh DIP Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas
Universitas Diponegoro Nomor: 202/XXIII/3/-/1996 tanggal 30
Maret 1996.

Berdasarkan surat perjanjian pelaksanaan penelitian No 211
A/PT09.OP/B/1996 tanggal 2 September 1996.

LAPORAN PENELITIAN

- =====
- 1.a. Judul Penelitian : Perkembangan Pendidikan Wanita pada Tahun 1900-1990 dan Dampaknya terhadap Pemberdayaan Wanita di Pantai Utara Jawa Tengah.
- b. Bidang Ilmu : Sejarah Sosial
- c. Kategori Penelitian : Pengembangan IPTEK
2. Susunan Tim Penelitian :
- Ketua Tim Penelitian :
- a. Nama : Dra. Chusnul Hayati, MS
- b. NIP : 130 892 623
- c. Pangkat/Golongan : Penata Tk I/III-d
- e. Unit Kerja : Fakultas Sastra UNDIP
3. Anggota Peneliti : 3 orang
4. Lokasi Penelitian : ARNAS RI dan Perpustakaan Nasional RI, Perwil Jateng, Perpustakaan Sonobudoyo dan Hatta Foundation di Yogyakarta.
5. Jangka waktu penelitian : 6 (enam) bulan
6. Biaya yang diperlukan : Rp. 2.920.000,-
(Dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
7. Sumber dana : Biaya Perawatan OPF Universitas Diponegoro tahun anggaran 1996/1997

Semarang, 28 Februari 1997



Menyusun dan Menyetujui:
Ketua Lembaga Penelitian Sastra UNDIP
A. Hari Basuki, SU
NIP. 130 324 157

Ketua Proyek Penelitian :

A. Melihat
Dra. Chusnul Hayati, MS
NIP. 130 892 623



Ketua Lembaga Penelitian UNDIP,
Dra. Chusnul Hayati, MS
NIP. 130 892 623

KATA PENGANTAR

Penelitian yang berjudul "Perkembangan Pendidikan Wanita pada tahun 1900-1990 dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Wanita di Pantai Utara Jawa Tengah" bertujuan untuk mengungkap latar belakang, faktor-faktor pendorong, serta aspek-aspek perkembangan pendidikan wanita, khususnya di daerah Pantai Utara Jawa Tengah. Di samping itu juga dikaji pengaruh pendidikan wanita terhadap pemberdayaan wanita untuk mengisi lapangan pekerjaan dalam masyarakat Indonesia.

Dalam penelitian ini, tentu saja, tim peneliti telah melibatkan banyak pihak, baik untuk memperoleh persetujuan, perijinan, maupun sumber-sumber yang diperlukan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, tim peneliti mengucapkan banyak terimakasih.

Sungguh disadari bahwa laporan penelitian ini masih belum sempurna. Oleh karena itu sangat diharapkan saran atau kritik para pembaca untuk menyempurnakannya.

Akhirnya, tim peneliti berharap, penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pendidikan khususnya, dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
INTISARI	v
ABSTRACT	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tinjauan Pustaka	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Kontribusi Penelitian	10
F. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	10
G. Sistematika	12
BAB II. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI INDONESIA	13
A.1. Jaman Belanda	13
A.1.1. Jaman VOC	13
A.1.2. Masa Kolonial Belanda	14
A.2. Masa Pendudukan Jepang	21
B. Masa Pasca Kemerdekaan	24
B.1. Landasan Idiil	24
B.2. Tujuan Pendidikan	24
B.3. Sistem Persekolahan	30
B.4. Jenjang dan Jenis Pendidikan	32
BAB III. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN WANITA TAHUN 1900-1990	33
A. Masa Pra Kemerdekaan	33
B. Perkembangan Pendidikan Wanita Pada Pasca	

Kemerdekaan	41
BAB IV. PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP PEMBERDAYAAN WANITA DI DAERAH PANTAI UTARA JAWA TENGAH 1900-1990	46
A. Pendidikan dan Pemberdayaan Wanita Pada Masa Penjajahan	47
B. Pendidikan dan Pemberdayaan Wanita Sesudah Kemerdekaan	57
BAB. V KESIMPULAN DAN SARAN	68
DAFTAR LITERATUR	73

INTISARI

Hingga awal abad ke 20 hanya golongan bangsawan dan golongan elite masyarakat saja yang dapat menikmati pendidikan modern. Di Jawa Tengah RA Kartini mempelopori pendidikan khusus bagi kaum wanita dengan membuka Sekolah Gadis Jawa pada tahun 1903 di Jepara. Usaha ini kemudian diikuti oleh para tokoh wanita dari daerah lain. Berdiri pula Wisma Pranawa di Tegal atas usaha RA Kardinah Tjondronegoro, adik RA Kartini. Di Sala berdiri Siswa Rini dan Sekolah Gadis Mangkunegaran, dan di Blora berdiri Darma Rini. Pendidikan khusus untuk kaum wanita semakin luas dengan berdirinya Kartini Fonds pada tahun 1913 yang mengusahakan berdirinya Sekolah Kartini. Pada tahun 1913 Sekolah Kartini berdiri di Semarang yang diikuti di Pekalongan pada tahun 1916, serta di berbagai kota di Jawa Timur dan Jawa Barat. Untuk menampung lulusan Sekolah Kartini pada tahun 1914 didirikan pula Sekolah Van Deventer. Sekolah Van Deventer di Jawa Tengah terdapat di Semarang dan Sala. Sementara itu pada tahun 1916 pemerintah memndirikan *Meisjes Kweekschool* di Salatiga, yang merupakan satu-satunya sekolah guru khusus untuk putri yang terdapat di Hindia Belanda pada waktu itu.

Pada masa sesudah kemerdekaan terjadi perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Jumlah sekolah dan murid sekolah mengalami peningkatan, karena pendidikan cenderung bersifat demokratis. Pendidikan untuk kaum wanitapun juga mengalami perkembangan. Dampak positif perkembangan pendidikan ini antara lain adalah pemberdayaan wanita yang meliputi terbukanya kesempatan kerja dengan imbalan yang baik untuk kaum wanita, peningkatan kemampuan untuk melakukan peranan domestik dan peranan sosial, serta kemampuan untuk mengatasi berbagai dinamika sosial.

Meskipun perkembangan pendidikan untuk kaum wanita di Jawa Tengah cukup baik, namun masih terdapat ketimpangan gender yang berakibat pada pemberdayaan wanita. Pengaruh pandangan tradisional masih sangat kuat, sehingga upaya pemberdayaan wanita pun masih menghadapi banyak kendala.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk mengumpulkan sumber sejarah, analisis sumber, interpretasi fakta sejarah, dan sintesis dalam bentuk penulisan laporan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis untuk memahami pengaruh pendidikan terhadap proses diferensiasi kerja, spesialisasi, peranan sosial kaum wanita, dan perubahan-perubahan sosial yang terjadi.

ABSTRACT

Up to the early twentieth century, only the noblemen and the elites could join the modern education. In Central Java, RA Kartini pioneered a special education for women by opening "School for Javanese Girls" in Jepara in 1903.

This effort was followed by other outstanding woman figures from other regions. In Tegal, Kartini's sister, RA Kardinah Tjondronegoro opened Wisma Pranawa. In Solo, Siswo Rini and School for Mangkunegaran Girls were established, and in Blora, Darma Rini was also founded.

Education for girls was blooming since the establishment of Kartini Foundation in 1913 which endeavored Sekolah Kartini. In 1919, Sekolah Kartini was founded in Semarang and other cities in East and West Java. To Provide continuing education for girls, Van Deventer School was founded in Semarang and Solo. Meanwhile, in 1916 the government opened Meisjes Kweekschool in Salatiga which was the only teacher training for girls found at that time.

After the independence of Indonesia, there were considerable changes in many aspects of life including education. The number of schools and students dramatically increased because of a democratic education system trend and education for girls was also increasing. The positive impacts of woman education among others was woman empowering covering a chance for women to have a better payment, the increase of woman role in both domestic and social setting and also their ability to overcome any kind of social problem.

Despite the fact that education for women was well developed, in Central Java there was still a gap on empowering in terms of gender. The influence of traditional view is still so strong that the woman empowering still remains a problem.

This research - using historical methods, is to collect historical resources, analysis, and interpretation of historical facts and synthesis to make a report writing. The approached used was a sociological one which try to understand the influence of education on work differentiation processes, specialization, social role of women and social changes happened.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pernyataan itu mengandung arti baik pria maupun wanita masing-masing mempunyai hak yang sama dalam menegakan pendidikan formal. Namun dalam kenyataannya pendidikan wanita masih terbelakang dibandingkan dengan pria karena adanya berbagai hambatan. Meskipun anak perempuan sudah mendapat kesempatan yang sama dengan anak laki-laki untuk memperoleh pendidikan, tetapi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi terdapat kesenjangan yang progresif menurut gender. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sedikit perempuan yang menamatkan studinya di masing-masing jenjang dibanding dengan jumlah laki-laki (Siti Hidayati Amal, 1995). Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin rendah pula rasio gender.

Terdapat berbagai kendala yang menyebabkan ketidaksetaraan pendidikan pria dan wanita, sehingga persamaan hak secara hukum tidak menjamin kesetaraan *de facto*. Berbagai faktor menjadi penyebabnya, baik faktor politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Faktor ini terutama karena struktur sistem patriarkhat yang mendominasi kehidupan sosial. Adanya pandangan mengenai pembagian peran bahwa tugas utama wanita adalah mengasuh anak dan mengurus rumah tangga sedang tugas laki-laki adalah mencari nafkah, mengembangkan kecenderungan bahwa tempat wanita adalah disektor domestik. Sosialisasi nilai kehidupan memperkuat sikap dan perilaku yang mengarah pada suatu gambaran bahwa aktivitas wanita terutama di sektor domestik dan aktivitas pria di sektor publik. Akibatnya sejak kecil anak perempuan sudah diarahkan pada tugas-tugas rumah tangga, sedang anak laki-laki

cenderung dibebaskan dari tugas-tugas itu dan diberi prioritas utama untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik. Sejak dini wanita menanggung beban pekerjaan rumah tangga yang lebih berat. Keadaan ini merupakan salah satu penyebab pendidikan wanita lebih rendah dari pada pria. Faktor sosial budaya tersebut sangat mempengaruhi kebijakan dan keputusan politik yang berkaitan dengan status dan peranan wanita.

Di dalam GBHN disebutkan mengenai peranan multidimensional wanita yang dirumuskan dalam panca tugas wanita. Disebutkan bahwa tugas wanita adalah sebagai pendamping suami, pendidik dan pembina generasi muda, pengatur rumah tangga, tenaga kerja, dan anggota organisasi masyarakat terutama organisasi wanita. Di sini tampak bahwa program-program pembangunan dan norma yang disusun bagi wanita lebih menekankan ketrampilan yang diperlukan bagi sektor domestik. Pandangan-pandangan yang bersumber pada nilai sosial budaya yang berciri patriarkhat juga mempengaruhi pertimbangan ekonomi. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin mahal biaya untuk bersekolah. Tingginya biaya ini menjadi hambatan untuk melanjutkan sekolah, terutama untuk mereka yang miskin. Keadaan ini mendorong orang tua lebih memilih untuk menyekolahkan anak laki-laki dari pada anak perempuan. Kondisi sosial tersebut juga merupakan dampak dari perkembangan sejarah. Pada masa kolonialisme Belanda, pendidikan untuk kaum pria mempunyai kegunaan langsung dan bersifat ekonomis. Pengajaran untuk anak lapisan atas adalah untuk tujuan politik, sedang yang diberikan kepada lapisan bawah adalah untuk tujuan politik dan ekonomi. Penyelenggaraan pendidikan terutama bagi lapisan atas atau priyayi tinggi untuk keperluan administrasi pemerintahan dan membentuk kelompok baru yang *westernminded*. Hampir semua sekolah pemerintah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Adapun pendidikan bagi kelas bawah adalah untuk memenuhi kebutuhan industri dan perkebunan partikelir

(Clive Day, 1966).

Sementara itu pendidikan wanita adalah untuk menjadikannya sebagai ibu, pendidik manusia yang pertama dan utama. Jadi di tangan wanitalah terletak masa depan bangsa. Pendidikan wanita juga ditujukan agar wanita lebih baik dalam melakukan peranan di lingkungan kehidupan rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari kurikulum yang diberikan bagi murid-murid wanita. Sekolah untuk gadis-gadis pada umumnya hanya memberikan pelajaran secara sederhana agar murid mampu membaca, menulis, dan berhitung. Hanya dalam jumlah terbatas gadis-gadis diperbolehkan masuk sekolah lanjutan dan kejuruan khusus untuk anak laki-laki. Gadis-gadis pada umumnya diarahkan untuk belajar mengenal tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, menjahit, menisik, menyulam, mengatur dan memelihara rumah, dan pengertian-pengertian pokok tentang ilmu kesehatan (C.Lekkerkerker, 1914).

Di samping kurikulum, jenis-jenis sekolah wanita seperti *Huishoudschool* dan *Frobelschool* tampaknya justru memperkuat stereotipe kaum wanita sebagai ibu rumah tangga. Agaknya pendidikan kaum wanita pada akhir kolonialisme Belanda masih membentuk visi yang berakar pada feodalisme dan kolonialisme. Adanya ketidaksamaan dalam pelajaran di sekolah itu, biasanya mengikuti prinsip lama yaitu bahwa wanita diciptakan untuk pekerjaan domestik sedang pria diciptakan untuk memasuki kehidupan publik dan mencapai kemajuan. Bahkan pada taraf tertentu gadis-gadis tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam mengikuti pendidikan formal. Diskriminasi pada masyarakat kolonial tampaknya lebih dirasakan oleh kaum wanita, karena tidak hanya menghadapi diskriminasi rasial saja. Peninggalaan sistem pendidikan kolonial mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan pada masa pasca kemerdekaan. Pendidikan dianggap sebagai prasyarat untuk menjadi pegawai negeri. Perluasan fasilitas pendidikan yang cepat selama tahun 1970-an telah memberikan keuntungan bagi kaum wanita. Jumlah pegawai

negeri sipil wanita pada tahun 1974 meningkat 18 % dan pada tahun 1984 menjadi 27 % (Evelyn Suleeman, 1995).

Di pihak lain, terdapat sekolah-sekolah kejuruan yang berkaitan dengan gender dan merupakan peninggalan sistem pendidikan Belanda. Sekolah teknik lebih diminati oleh anak laki-laki, sementara itu sekolah yang berkaitan dengan kerumahtanggaan lebih diminati oleh anak perempuan. Pendidikan wanita di daerah pantai utara Jawa berkembang lebih awal dibanding dengan daerah lain di Jawa Tengah. Hal ini berkaitan dengan keluarga RA Kartini yang merupakan pelopor pendidikan Barat dan gagasan-gagasan Kartini tentang pendidikan wanita. Pada pertengahan abad 19 PA Tjondronegoro, Bupati Kudus, telah memberikan pendidikan Barat kepada putra putrinya. Kartini sendiri telah mulai mendirikan sekolah putri di Jepara pada tahun 1900-1901. Pada tahun 1912 Van Deventer mendirikan Sekolah Kartini yang pertama di Semarang dan kemudian disusul di berbagai kota lain di Jawa (Sartono Kartodirdjo, 1977).

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini berusaha untuk mengkaji pendidikan wanita sejak jaman kolonialisme Belanda hingga masa Orde Baru yang meliputi rentang waktu dari 1900-1990. Rentang waktu yang cukup panjang itu sengaja dipilih agar dapat dipahami perubahan-perubahan pola, struktur, sistem, dan berbagai aspek pendidikan wanita. Disamping itu juga untuk membuktikan asumsi-asumsi bahwa terdapat paralelisme historis antara pola pendidikan pada masa kolonial dengan masa Orde Baru. Misalnya saja bahwa faktor-faktor politik lebih melatarbelakangi kebutuhan pendidikan dari pada faktor intelektual.

Pendidikan wanita berkaitan erat dengan pluralisme sosial. Hal ini disebabkan karena wanita merupakan golongan yang sangat berbeda satu sama lain baik dalam status sosial, agama, etnis, lingkungan sosial budaya dan sosial

ekonomi, lingkungan keluarga, pengalaman pribadi, maupun pengaruh dari luar. Heterogenitas ini sangat mempengaruhi sikap wanita terhadap pendidikan sehingga menggambarkan kompleksnya pluralisme sosial di kalangan wanita. Permasalahan-permasalahan yang masih sangat melekat dengan dunia wanita akan semakin menggambarkan corak yang sangat heterogen dalam kehidupan sosial wanita.

Kiranya perlu pula dianalisis beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan, khususnya pendidikan wanita. Bagaimanakah latar belakang penyelenggaraan pendidikan formal, dan pandangan-pandangan yang bagaimanakah yang berlaku dalam sejarah pendidikan? Dorongan-dorongan apakah yang mendominasi penyelenggaraan pendidikan, termasuk pendidikan untuk wanita?

Pendidikan modern bagi kaum wanita yang diperkenalkan secara luas sejak awal abad ke 20, telah memberikan kemajuan yang sangat berarti bagi kaum wanita. Namun demikian bukan berarti tidak ada sisi-sisi yang kurang menguntungkan dari pendidikan kolonial bagi kaum wanita. Sisi-sisi inilah yang menarik untuk dikaji. Dalam perkembangan masyarakat dapat dijumpai adanya kontinuitas dan diskontinuitas. Kontinuitas yang dimaksud adalah tetap adanya pola tradisional dalam kehidupan wanita, meskipun telah mengalami pendidikan modern. Dengan demikian terdapat dua hal yang menarik dari permasalahan pendidikan kaum wanita. Di satu pihak, status dan peranan wanita terpengaruh oleh modernisasi. Namun di pihak lain, akar dari status dan peranan wanita sebagai istri pendamping suami tetap dipertahankan. Disinilah kita perlu untuk mencari realitas budaya. Benarkah bahwa tradisi masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, menempatkan wanita secara dikhotomis? Bagaimanakah kolonialisme telah memanfaatkan feodalisme sehingga keduanya secara terpadu membelenggu kehidupan wanita?

Akan ditelaah apa tujuan pendidikan bagi kaum wanita pada masa kolonialisme Belanda? apakah pelaksanaan pendidi-

kan bagi kaum wanita itu telah mencukupi, dan mencukupi untuk apa? Pendidikan yang bagaimanakah yang telah memberi kesempatan kepada kaum wanita untuk memperoleh kemajuan? Sebaliknya pendidikan bagaimanakah yang justru menyebabkan *keajegan* atau bahkan kemunduran? Mengapa pendidikan kolonial tidak melahirkan manusia (wanita) yang bebas dan mampu mandiri? Permasalahan-permasalahan diatas akan dikaitkan dengan corak pluralisme sosial masyarakat Jawa, sehingga menggambarkan adanya wajah yang berlainan dalam menanggapi berbagai kebijaksanaan dan pelaksanaan pendidikan bagi kaum wanita yang dibedakan oleh berbagai perbedaan.

Meskipun wanita telah memperoleh pendidikan, namun masih tetap terjadi subordinasi terhadap wanita. Lembaga pendidikan dimanfaatkan untuk mempengaruhi cara pandang dan keyakinan masyarakat, bahwa wanita terletak di bawah hegemoni laki-laki. Pendidikan yang disatu pihak telah memberikan kemajuan bagi kaum wanita dan mendorong aktivitas dalam pergerakan wanita, ternyata masih belum mengubah dominasi kultur yang tidak adil. Pendidikan untuk kaum wanita pada masa itu, justru memperkuat stereotipe kaum wanita sebagai ibu rumah tangga sehingga sangat merugikan mereka. Sementara itu, pada masa Orde Baru pendidikan telah mengantarkan wanita menduduki posisi penting dan memiliki profesi dalam berbagai bidang. Namun tampaknya masih terdapat kecenderungan ketidakmampuan untuk melepaskan dari subordinasi terhadap wanita. Itulah sebabnya penelitian ini perlu dilakukan.

C. Tinjauan Pustaka

Penelitian sejarah khusus mengenai pendidikan wanita yang dilakukan secara menyeluruh belum pernah dikerjakan. Penelitian yang pernah dilakukan adalah penelitian tentang pendidikan wanita pada masa kini. Sementara itu penelitian sejarah tentang pendidikan wanita yang telah dilakukan bersifat fragmentaris dan merupakan bagian dari kegiatan

organisasi-organisasi pergerakan wanita. Namun demikian telah ada tulisan-tulisan tentang pendidikan wanita, seperti yang ditulis oleh C. Lekkerkerker di dalam *Kolonial Kolonial Tijdschrift No 3*, tahun 1914. Ia mengemukakan bahwa gadis-gadis Indonesia perlu sekali memperoleh pendidikan agar lebih mampu mengelola rumah tangga dengan baik, paham masalah kesehatan dan mengurangi kecenderungan beranak banyak. Bila wanita terpelajar maka akan mampu mendampingi kaum pria yang berpikiran maju. Tujuan yang menurut penulis paling kurang penting adalah membuka jalan bagi kaum wanita untuk ikut serta dalam hidup bermasyarakat dengan menduduki berbagai jabatan. Dari tulisannya ini tampak bahwa ide subordinasi terhadap wanita sangat jelas. Ia juga berpendapat perlu perluasan sekolah-sekolah khusus untuk gadis, karena ko-edukasi tidak begitu disukai. Ada keengganan dari orang tua untuk menyekolahkan gadis-gadis pada sekolah-sekolah campuran. Keengganan itu juga terjadi pada para gadis. Oleh karena itu terdapat pemisahan antara sekolah campuran dan sekolah khusus untuk gadis. Sekolah campuran biasanya diselenggarakan untuk tingkat sekolah dasar, sedang sekolah-sekolah khusus untuk gadis didirikan untuk tingkat lanjutan. Sekolah khusus harus bertujuan membentuk ibu rumah tangga yang maju dan berpendidikan baik (C. Lekkerkerker, 1914). Tampak bahwa tujuan pendidikan wanita justru untuk memperkuat stereotipe kaum wanita sebagai ibu rumah tangga. Tujuan pendidikan bukan untuk pengembangan kemandirian dan peningkatan status.

Sejarah pendidikan secara umum, telah ditulis oleh I.J. Brugmans dalam *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlands-Indie*. Karya ini membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Barat sejak pertengahan abad 19 hingga awal abad 20. Diuraikan pula tentang tujuan dan politik pendidikan serta pandangan mengenai pendidikan Barat. Pendidikan kolonial yang dimulai pada pertengahan abad ke 19 disebabkan oleh kepentingan *cultuurstelsel*.

Politik pendidikan pada masa liberal mengalami perubahan-perubahan. Pendidikan pada masa pemerintahan liberal telah dirintis oleh Menteri Francen van de Putte, penganjur pendidikan liberal. Ia berpendapat bahwa pengajaran untuk anak-anak bumiputera harus diperluas, tidak hanya terbatas pada usaha menyiapkan calon-calon pegawai pemerintah saja. Seperti halnya di Netherland sekolah ditujukan untuk memajukan penduduk dan terpisah dari persoalan kebutuhan pegawai administrasi pemerintahan. Perluasan pengajaran tersebut tidak hanya dengan menambah jumlahnya saja. Akan tetapi harus dipikirkan pula peningkatan mutu pengajarannya untuk memenuhi kepentingan penduduk, terutama kelompok yang diperhitungkan dapat menduduki tempat yang lebih tinggi dari kedudukannya semula.

Perkembangan sekolah semakin meningkat karena penambahan biaya oleh pemerintah. Jumlah sekolah yang pada tahun 1854 ada 20 buah, pada tahun 1870 naik menjadi 79. Di samping itu, adanya Departemen van Onderwijs yang dibentuk pada tahun 1867 menambah perhatian untuk memajukan pengajaran bumiputera. Sekolah bumiputera disediakan untuk anak-anak kepala dan penduduk terpandang dan kemudian untuk anak-anak penduduk biasa. Sekolah untuk anak dari keluarga terpandang dipisahkan dari sekolah untuk penduduk biasa. Di sekolah itu diberikan pelajaran bahasa Belanda, dan merupakan pengajaran yang tingkatnya lebih tinggi dari pada sekolah dasar bumiputera (I.J. Brugmans, 1938).

Pembahasan mengenai pendidikan wanita di Indonesia tidak dapat mengabaikan gagasan-gagasan dan idealisme Kartini, dalam *Kartini: Surat-Surat kepada Ny. Abendanon-Mandri dan Suaminya*, yang diterjemahkan oleh Sulastin Sutrisno. Menurut Kartini pendidikan wanita tidak hanya pendidikan formal di sekolah saja, tetapi pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat juga sangat penting. Bagi wanita pendidikan moral sangat penting karena sebagai peletakkan dasar watak dan kepribadian anak didik. Pendidik-

kan merupakan kunci kemajuan bangsa, sehingga setiap anak harus memperoleh pendidikan. Pendidikan sifatnya harus mendiskriminatif tanpa membedakan jenis kelamin, agama, keturunan, kedudukan sosial, dan sebagainya. Selain memberikan pengetahuan dan ketrampilan, pendidikan hendaknya lebih mengutamakan pembentukan watak dan kepribadian anak. Pendidikan bagi kaum wanita sangat penting agar mampu mengejar ketertinggalannya dalam berbagai bidang. melalui pendidikan, wanita Indonesia diharapkan dapat menduduki berbagai jabatan dan memiliki berbagai profesi baik sebagai guru, perawat, bidan, dokter, apoteker, dan sebagainya (Sulastin Sutrisno, 1992).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pembahasan mengenai sejarah perkembangan pendidikan wanita sejak jaman kolonialisme Belanda hingga masa kini penting untuk dikaji, karena:

1. Dapat mengetahui corak dan proses perkembangan yang terus berlanjut, yang akhirnya memberi bentuk pada masa kini. Dengan mengungkap perkembangan pendidikan wanita di tingkat lokal dalam rentang waktu yang panjang dapat dipergunakan untuk memahami perkembangan pendidikan wanita dan implikasinya di dalam masyarakat.
2. Untuk mengembangkan studi sejarah wanita, dengan memperhatikan aspek gender. Dengan memahami rasio gender mengenai perkembangan historis wanita dalam perspektif sejarah lokal akan dapat diperoleh gambaran mengenai hambatan-hambatan bagi upaya pemberdayaan wanita.
3. Untuk mengetahui posisi wanita dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan di dalam masyarakat. Di samping itu, agar dapat lebih dipahami upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai kalangan dalam pendidikan wanita, masalah emansipasi, integrasi wanita dalam pembangunan, maupun masalah peran ganda wanita. Pemahaman masalah-

masalah tersebut akan sangat bermanfaat bagi upaya peningkatan sumber daya wanita.

E. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Memperoleh pengetahuan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan pendidikan wanita sehingga dapat memperkaya khasanah penelitian sejarah.
2. Bahan masukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan pendidikan wanita dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis gender.
3. Membantu dalam upaya proses pemberdayaan wanita untuk mengubah kehidupan wanita menjadi lebih baik sehingga terjadi hubungan yang benar-benar setara antara pria dan wanita.

F. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian ini adalah metode sejarah yang meliputi tahap heuristik atau pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi atau tahap penulisan laporan. Dalam studi sejarah, penggunaan sumber sejarah sebagai rekaman peristiwa masa lampau bersifat mutlak. Penyusunan sejarah perkembangan pendidikan wanita dituntut untuk lebih keras dalam mengumpulkan dan mencari data dari sumber primer dan sumber tertulis, karena sebagian besar berbahasa Belanda. Sumber dokumenter yang digunakan sebagai bahan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa jenis.

Pertama, dokumen pemerintah baik yang sudah diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan. Dokumen pemerintah yang tidak diterbitkan misalnya berupa: (1) *missive* yaitu surat resmi atau laporan-laporan dari residen kepada gubernur jenderal. Laporan-laporan mengenai penyelenggaraan dan perkembangan pendidikan dari daerah-daerah oleh residen tentu memuat berbagai aspek pendidikan, karena residen adalah ketua komisi sekolah sedang asisten residen sebagai

sekretaris. (2) Keputusan-keputusan pemerintah baik mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan maupun pengangkatan dan promosi jabatan atas dasar jenjang dan jenis sekolah. (3) *Memorie van Overgave* yaitu laporan serah terima jabatan yang antara lain meliputi kondisi pendidikan. (4) Laporan-laporan rapat. (5) Kumpulan arsip pergerakan abad 20 yang berisi perhimpunan bersifat pendidikan. Adapun dokumen pemerintah yang sudah diterbitkan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : (1) *Jaarverslag* khusus mengenai pendidikan wanita. (2) *Het Onderwijsbeleid in Nederlands-Indi 1900-1940* yang berupa kumpulan publikasi sumber mengenai kebijaksanaan pendidikan. (3) Terbitan dokumen pemerintah lain seperti *Kolonial Verslagen, Regeeringsalmanak, Staatsbladen van Nederlands-Indie*.

Kedua, bahan dokumenter yang berupa surat kabar dan majalah yang tidak hanya memuat fakta, tetapi juga pendapat dan pikiran-pikiran spekulatif mengenai suatu masalah. Penggunaan koran daerah yang terbit di Semarang akan sangat membantu dalam proses pengumpulan data. Koran itu antara lain *De Locomotief*, dan surat kabar pribumi seperti *SI Tetap, Sinar Djaja*, dan *Sinar Hindia*. Koran-koran itu sangat diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai hal yang menyangkut penyelenggaraan, kondisi, dan perkembangan pendidikan di daerah pantai utara Jawa. Adapun koran pribumi sangat penting artinya untuk membandingkan atau melengkapi keterangan dari pemerintah.

Ketiga, sumber-sumber skunder berupa hasil-hasil penelitian atau karya-karya ilmiah dan tulisan-tulisan lainnya mengenai pendidikan. Termasuk di dalam kategori ini adalah biografi dari para tokoh pergerakan nasional yang berkasitan erat dengan mengembangkan pendidikan.

Setelah proses pengumpulan sumber, kemudian dilakukan proses seleksi bahan yang sesuai dengan penelitian ini. Langkah berikutnya dilakukan kritik sumber. Ada dua macam kritik sumber, yaitu kritik ekstern untuk memperoleh oten-

tisitas sumber dan kritik intern untuk menguji kredibilitas sumber. Kritik intern sangat diperlukan, karena sumber biasanya bersigat subyektif.

Sesudah kritik sumber, dilakukan serialisasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh untuk menentukan relevansi hubungan kausal, serta jalinan keterkaitan antara fakta yang satu dengan fakta-fakta lainnya. Di dalam proses ini interpretasi dan imaginasi sejarah dituntut agar dapat mengungkapkan proses dan struktur peristiwa secara koheren.

G. Sistematika

Laporan penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah dan permasalahan, perumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, kontribusi penelitian, serta metode penelitian dan pengumpulan data. Sementara itu bab dua menguraikan tentang kebijaksanaan pendidikan pada masa Pemerintah Kolonial Belanda, Pendudukan Jepang, Masa Revolusi, dan masa sesudah kemerdekaan. Pada bab ini dibahas pula mengenai kebijaksanaan pemerintah terhadap pendidikan wanita. Kemudian bab tiga menjelaskan tentang perkembangan pendidikan sejak jaman penjajahan Belanda hingga masa Pemerintah Orde Baru yang meliputi rentang waktu dari tahun 1900 hingga 1990. Adapun bab empat membahas tentang pengaruh pendidikan terhadap upaya pemberdayaan wanita di daerah Pantai Utara Jawa yang berlangsung sejak masa Pemerintah Kolonial Belanda hingga tahun 1990. Laporan penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang diuraikan dalam bab lima.